

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1). Sejalan dengan hal itu, Agustian (2013) menegaskan bahwa pernikahan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab, serta tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan bukan hanya sekedar hubungan legal, tetapi mencakup aspek emosional, spiritual yang menuntut kesiapan mental, sosial, dan religius dari kedua belah pihak.

Lebih lanjut, menurut Utami & Prodi (2015) di dalam pernikahan terkandung komitmen moral dan intelektual yang dapat memberikan manfaat positif, seperti meningkatkan kebahagiaan jiwa, kejernihan pikiran, dan kebersihan hati. Pernikahan juga menjadi ruang untuk memenuhi kebutuhan psikologis yang esensial, seperti rasa aman, cinta, keintiman, dan rasa memiliki, yang pada akhirnya membantu individu menyempurnakan kehidupannya dari aspek psikis. Oleh karena itu, kesiapan psikologis dan kematangan emosional menjadi elemen penting dalam membangun rumah tangga yang sehat dan bahagia (Suryono & Anggraini, 2021).

Namun, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Berbagai faktor seperti ketidaksiapan emosional, komunikasi yang tidak efektif, kurangnya komitmen, ketidaksetiaan, tekanan ekonomi, serta perbedaan nilai dan tujuan hidup menjadi penyebab umum terjadinya konflik dalam rumah tangga (Matondang, 2014). Ketika konflik ini tidak dikelola dengan baik, hubungan suami istri akan mengalami penurunan kualitas, yang ditandai dengan berkurangnya keintiman emosional, hilangnya kepercayaan, dan meningkatnya ketegangan dalam hubungan. Proses tersebut secara bertahap dapat mengarah

pada perceraian, yang sering kali dipilih sebagai jalan akhir ketika pasangan merasa tidak lagi mampu mempertahankan pernikahan (Iskandar, 2021).

Perceraian kini menjadi isu sosial yang semakin marak terjadi di Indonesia. Secara umum, perceraian bisa dipahami sebagai peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi (Dariyo, 2004). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah “putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan keputusan pengadilan dan disertai alasan-alasan tertentu sesuai hukum yang berlaku.

Fenomena ini juga tampak nyata berdasarkan data laporan statistik pada tahun 2023 tentang kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan 15% mencapai 479.268 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kasus perceraian ini telah mencapai angka tertinggi dalam statistik perceraian selama 6 tahun terakhir (BPS, 2023). Tren peningkatan ini juga tercermin pada tingkat provinsi, termasuk di Jawa Timur yang mencatat lebih dari 80.000 kasus perceraian pada tahun yang sama (BPS, 2023). Salah satu wilayah di Jawa Timur yang turut menyumbang angka cukup tinggi adalah Pulau Madura, dengan total 6.383 kasus perceraian dari 27.499 pernikahan yang tercatat. Rinciannya meliputi 1.592 kasus di Bangkalan, 1.435 kasus di Sampang, 1.399 kasus di Pamekasan, dan 1.957 kasus di Sumenep (BPS, 2024).

Perceraian merupakan salah satu bentuk perubahan signifikan dalam kehidupan yang dapat memengaruhi kondisi psikologis individu secara mendalam (Dariyo, 2004). Hal ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam struktur keluarga, tetapi juga menyentuh aspek identitas personal dan sosial. Bagi sebagian individu, perceraian bisa menjadi jalan keluar dari konflik yang berlarut, namun bagi banyak orang lainnya, peristiwa ini justru menjadi awal dari tekanan psikologis yang mendalam (Khairuddin, 2024). Namun, sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti dampak perceraian terhadap perempuan, sedangkan laki-laki relatif kurang diperhatikan. Adapun studi Amato (2000) menemukan bahwa

laki-laki yang bercerai cenderung mengalami kesulitan menjalin relasi sosial dan merasa terasing dari lingkungannya.

Kondisi diatas menjadi semakin kompleks dalam konteks masyarakat etnis Madura yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan dan harga diri serta peran laki-laki sebagai kepala keluarga. Sebagaimana perkawinan dalam budaya Madura tidak hanya dianggap sebagai ikatan sah antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai simbol kedewasaan dan pengakuan sosial terhadap maskulinitas seorang laki-laki. Seorang laki-laki baru dianggap “lengkap” secara sosial setelah menikah. Kehormatan istri pun dipandang sebagai cerminan kehormatan suami, sebagaimana tergambar dalam ungkapan *bantalla pate* atau “landasan kematian” yang menegaskan pentingnya peran laki-laki dalam menjaga martabat keluarga (Wiyata, 2008).

Secara demografis, masyarakat Madura merupakan salah satu etnis terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sunda (De Jonge dalam Wiyata, 2013). Spaeth (dalam Setyaningsih, 2023) juga mencatat bahwa etnis Madura dikenal sebagai kelompok pengembara terbesar di Indonesia. Mobilitas tinggi ini menjadikan orang Madura memiliki semangat kemandirian yang kuat, namun tetap berpegang pada nilai-nilai budaya yang menekankan kehormatan, tanggung jawab, dan solidaritas kekerabatan (Rifa’I, 2007). Dalam sistem nilai tersebut, terdapat pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki ditempatkan sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi, sementara perempuan diharapkan menjadi penjaga keharmonisan dan kehormatan domestik (Mardhatillah, 2014). Peran ini menjadikan posisi laki-laki sangat sentral dalam menjaga martabat keluarga dan menentukan status sosialnya di mata masyarakat.

Dalam kerangka inilah muncul konstruksi maskulinitas laki-laki Madura yang khas. Sebagaimana Rifai, et al. (2022) menegaskan bahwa maskulinitas laki-laki Madura melekat pada tiga aspek utama, yakni tanggung jawab, kegagahan, dan harga diri. Tanggung jawab tercermin dalam kewajiban laki-laki untuk menafkahi, melindungi, dan menjadi pemimpin keluarga. Kegagahan diartikan sebagai keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tantangan hidup, bahkan

dalam konteks ekstrem dapat diwujudkan melalui praktik *carok* sebagai bentuk mempertahankan kehormatan. Sementara itu, harga diri menjadi standar utama dalam menilai kehormatan seorang laki-laki, sehingga keberhasilan menjaga rumah tangga dipandang sebagai simbol martabatnya. Sebagaimana Ungkapan yang populer di Madura, “*ettembang pote mata, lebbi bagus pote tolang*” (daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati berkalang tanah) menunjukkan bahwa menjaga kehormatan dan harga diri dianggap lebih penting daripada sekadar mempertahankan hidup (Wiyata, 2013). Nilai keberanian dan kegagahan juga terinternalisasi dalam karakter laki-laki Madura yang identik dengan ketegasan, keberanian mental maupun fisik, serta kemampuan untuk mempertahankan martabat keluarga (Taufiqurrahman, 2007).

Selaras dengan itu, Setyaningsih (2021) menjelaskan bahwa harga diri dalam budaya Madura merupakan nilai yang bersifat sosiokultural, karena menunjukkan tempat atau kedudukan seseorang dalam struktur sosial. Dengan demikian, peran yang dijalankan oleh seorang laki-laki dalam keluarga sangat menentukan martabat dan penghargaan sosial yang diterimanya di mata masyarakat. Ketika perceraian terjadi, kegagalan mempertahankan rumah tangga bukan hanya dipandang sebagai krisis pribadi, tetapi juga dapat menjadi ancaman terhadap harga diri dan status sosial laki-laki di tengah sistem masyarakat yang patriarkal (Kamalia & Susanti, 2020).

Konstruksi budaya mengenai harga diri laki-laki sangat terkait dengan sistem tradisional *tanean lanjheng* yang masih dijalankan oleh masyarakat Madura. Dalam tradisi ini, anak perempuan yang telah menikah tetap tinggal di lingkungan rumah orang tuanya, sementara suaminya akan tinggal di rumah tersebut bersama keluarga mertua. Dalam tradisi ini, orang tua memiliki kewajiban untuk membangunkan rumah (*sangkolan*) bagi anak perempuan yang menikah (Ma'arif, 2023). Maka saat terjadi perceraian, laki-laki tidak hanya kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan tempat tinggal yang sering kali disertai dengan penurunan martabat dan status sosial. Sebab dalam budaya Madura, rumah dan posisi di dalam *tanean* merupakan simbol kehormatan dan harga diri seorang laki-laki. Sehingga keharusan untuk kembali ke rumah asal

sering kali dimaknai sebagai bentuk kegagalan dalam menjalankan peran sebagai suami dan menimbulkan rasa malu yang mendalam (Selamet, 2019).

Anggapan negatif yang menyertai perceraian pun memperburuk keadaan. Masyarakat kerap memberikan label seperti *so'leran* atau *tak lakek* kepada laki-laki yang bercerai. Istilah *tak lakek* secara harfiah berarti “tidak laki” atau “tidak berharga”, yang dalam konteks budaya Madura merepresentasikan hilangnya pengakuan terhadap peran sosial laki-laki sebagai pemimpin dan pelindung keluarga (Kamalia dan Susanti, 2020). Sejalan dengan hal itu, Sebutan seperti *so'leran* atau *tak lakek* membuat banyak dari mereka merasa malu, kehilangan rasa percaya diri, serta mengalami runtuhnya harga diri. Bahkan, demi mengembalikan citra sebagai “laki-laki sejati”, tak jarang mereka terdorong melakukan tindakan ekstrem seperti melakukan *carok* untuk memperoleh kembali pengakuan dari masyarakat (Suryantoro, 2025).

Sebagaimana fenomena *carok* di masyarakat Madura kerap menjadi sorotan media nasional sebagai bentuk kekerasan yang berakar pada tekanan sosial budaya terkait konsep maskulinitas. Berbagai berita yang beredar menunjukkan bahwa konflik *carok* sering dipicu oleh tuduhan pelecehan harga diri atau penghinaan yang membuat seseorang dianggap *tak lakek* istilah yang berarti "bukan laki-laki" dan membawa stigma sosial yang sangat berat. Salah satu contohnya diberitakan oleh detik.com pada 17 Juli 2024 di Desa Tlanakan, Pamekasan, ketika terjadi *carok* maut yang melibatkan A (42) dan korban R (45). Konflik tersebut dipicu oleh perselingkuhan antara istri pelaku dengan R, yang mengakibatkan istri pelaku meninggalkan rumah. Motif mempertahankan kehormatan dan menghindari rasa malu, termasuk perasaan bahwa tanggung jawabnya sebagai suami telah terciderai, menjadi faktor pendorong utama hingga akhirnya A melakukan tindakan *carok* (Zen, 2024). Kasus serupa juga ditemukan peneliti pada tahun 2018 di Desa Jeddih, Bangkalan. Melalui wawancara dengan pelaku pada tanggal 19 september 2025, terungkap bahwa peristiwa *carok* maut tersebut dipicu oleh perselingkuhan yang dilakukan mantan istri pelaku beberapa tahun sebelumnya saat ia masih merantau. Meskipun saat itu keduanya telah lama bercerai dan bahkan sudah menikah kembali dengan pasangan masing-masing,

pelaku mengungkapkan bahwa ia tetap merasa harga dirinya tercoreng secara mendalam serta perasaan *maloe* yang belum terbalas. Sehingga sebagai upaya menebus kehormatan yang dianggap hilang, ia kemudian melakukan *carok*.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa tantangan terhadap kehormatan laki-laki yakni melalui tuduhan perselingkuhan atau gangguan terhadap istri yang menjadi pemicu tindakan kekerasan (*carok*). Tindakan mengganggu istri orang atau perselingkuhan dipandang sebagai runtuhnya identitas maskulin, yang membuat laki-laki merasa malu (*malo*) dan kehilangan harga diri (Titian, 2023). Dalam kondisi demikian, sebagian laki-laki memilih *carok* sebagai cara untuk memulihkan martabat dan memperoleh kembali pengakuan dari masyarakat.

Menurut hasil wawancara pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan budayawan Madura Hidrocin menjelaskan bahwa konsep *tak lakek* dalam masyarakat etnis Madura memiliki makna yang cukup kompleks dan berkaitan erat dengan cara pandang masyarakat terhadap keberhasilan seorang laki-laki dalam menjaga keutuhan serta kehormatan keluarganya. Istilah ini tidak hanya disematkan pada laki-laki yang gagal menunjukkan keberanian melalui *carok* atau yang tersangkut kasus perselingkuhan saja, tetapi juga mencerminkan penilaian sosial terhadap ketidakmampuan seorang suami mempertahankan kehidupan rumah tangganya.

Dalam masyarakat Madura yang menempatkan nilai harga diri, tanggung jawab, dan peran kepemimpinan laki-laki sebagai ukuran kehormatan, perceraian sering kali dimaknai sebagai bentuk kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut. Ketidakmampuan menjaga stabilitas rumah tangga dianggap mencederai martabat pribadi dan keluarga, sehingga menimbulkan stigma *tak lakek* yang melekat kuat pada laki-laki yang bercerai. Pandangan *tak lakek* ini juga tercermin dalam ungkapan masyarakat seperti, “*Mempertahankan keluarga sendiri saja tidak bisa, bagaimana mau dijadikan pemimpin komunitas.*” Dengan demikian, masyarakat menilai bahwa laki-laki tersebut telah gagal menjaga keseimbangan dan keutuhan relasi rumah tangga yang dapat memengaruhi peran sosial mereka di mata Masyarakat sehingga label *tak lakek* dilekatkan kepadanya sebagai bentuk sanksi

sosial. Stigma sosial ini menimbulkan dampak sosial pada laki-laki, label *tak lakek* dapat memunculkan dorongan untuk melakukan tindakan ekstrem seperti *carok*, terutama apabila perceraian dianggap mencederaikan kehormatan atau nama baik keluarga, misalnya karena gangguan terhadap istri. Namun pada kasus lain, label *tak lakek* ini justru menimbulkan perasaan *todus* yang mendalam, kehilangan harga diri, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Beberapa di antaranya memilih untuk menghindari dari masyarakat bahkan memilih meninggalkan tempat asal dalam waktu yang tidak diketahui untuk kembali karena tidak lagi mampu menghadapi tekanan sosial atau perasaan *todus* akibat hilangnya pengakuan sebagai laki-laki yang “sejati” dalam norma budaya Madura.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan wawancara tidak terstruktur, pada bulan juli- Agustus yang berjumlah 25 laki-laki etnis Madura yang bercerai yakni; 5 laki-laki yang bercerai di warung x di Bangkalan, 4 laki-laki yang bercerai di Desa keleyan, 6 laki-laki yang bercerai di Desa pedeng, 6 mantan klien LBH (Lembaga Badan Hukum) di Bangkalan, 2 laki-laki yang bercerai sedang merantau dan 2 laki-laki yang bercerai di Desa jeddih. Mereka mengalami anggapan negatif dari masyarakat, seperti dianggap *Tak lakek* yang berarti lemah, tidak bertanggung jawab, penyebab utama perceraian, gagal atau tidak kompeten dalam memimpin rumah tangga. Peneliti juga menemukan sebutan *tak lakek* pada laki-laki yang bercerai tapi tidak memiliki anak yang menandakan bentuk kegagalan maskulinitas dalam mempertahankan rumah tangga serta keraguan kejantanan laki-laki dalam memberikan keturunan.

Tekanan sosial ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berdampak nyata terhadap perubahan perilaku, khususnya dalam bentuk menghindari lingkungan sosial seperti pos ronda, warung kopi, *koloman*, *langgaran*, tahlilan, *tok-otok* dan kegiatan kolektif lainnya. Hal ini terjadi karena mereka merasa telah kehilangan peran sosial yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Hubungan dengan teman sebaya pun turut terpengaruh, ditandai dengan sikap menjaga jarak dan menolak ajakan berkumpul. Tidak hanya itu, dalam aspek pekerjaan, laki-laki yang bercerai juga menunjukkan perubahan perilaku yang mengarah pada penurunan motivasi kerja. Mereka yang sebelumnya aktif

bekerja harian atau berdagang mulai menunjukkan ketidakteraturan, kehilangan semangat, atau bahkan menghentikan aktivitas kerja untuk waktu yang tidak menentu. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi tersebut mendorong laki-laki bercerai untuk meninggalkan lingkungan asal. Beberapa di antaranya memutuskan untuk merantau, bukan semata-mata mengikuti tradisi mobilitas orang Madura untuk mencari penghidupan, tetapi lebih sebagai strategi untuk mengasingkan diri. Fenomena penghindaran tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *todus* (malu) dalam budaya Madura, yaitu perasaan malu yang muncul akibat tindakan yang dianggap menyimpang dari norma (Wiyata, 2013). Hal ini mendorong individu untuk mengasingkan diri sebagai strategi menghindari tekanan sosial serta besarnya perasaan *todus*.

Perubahan-perubahan perilaku diatas, mengisyaratkan adanya tekanan psikososial yang cukup besar. Bentuk respons yang muncul seperti penghindaran dari lingkungan sosial, berkurangnya interaksi dengan orang lain, hilangnya peran dalam kegiatan masyarakat, serta rasa keterasingan di lingkungan tempat tinggal mencerminkan adanya gangguan pada fungsi psikologis individu. Hal ini sejalan dengan temuan Rifa'i (2007) menegaskan bahwa dalam struktur sosial Madura, posisi laki-laki sangat erat kaitannya dengan keberhasilan mereka dalam memimpin keluarga. Ketika hal itu gagal dipenuhi, diskriminasi muncul sebagai konsekuensi dari hilangnya pengakuan sosial tersebut.

Melihat kondisi tersebut, idealnya laki-laki yang mengalami perubahan besar dalam hidup seperti perceraian tetap mampu menjalani hidup secara seimbang dan bermakna apabila memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik. Ryff (2013) menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis adalah kondisi ketika seseorang dapat berfungsi secara positif dalam berbagai aspek kehidupan, dengan mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya demi mencapai kualitas hidup yang utuh. Dalam konteks ini, kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pada laki-laki yang bercerai, karena menyangkut bagaimana individu mampu menjalani hidup secara bermakna dan seimbang meskipun menghadapi tekanan dan perubahan besar dalam hidupnya.

Sebagaimana Ryff menyusun enam dimensi utama dalam konsep kesejahteraan psikologis, yaitu: (1) penerimaan diri (*self-acceptance*) yakni kemampuan individu untuk menerima diri secara utuh, termasuk kekurangan dan pengalaman masa lalu, (2) hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*) yang mencerminkan kapasitas untuk membina relasi yang hangat dan bermakna, (3) otonomi (*autonomy*) yaitu kemandirian dalam berpikir dan bertindak berdasarkan nilai pribadi, (4) penguasaan lingkungan (*environmental mastery*) yakni kemampuan mengelola kehidupan dan menciptakan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan, (5) tujuan hidup (*purpose in life*) yang mencerminkan arah dan makna dalam menjalani kehidupan, dan (6) pertumbuhan pribadi (*personal growth*) yaitu dorongan untuk terus berkembang dan memaksimalkan potensi diri.. Keenam dimensi ini saling berkaitan dalam mencerminkan sejauh mana individu dapat menyesuaikan diri, menjalani hidup dengan makna, dan berkembang secara optimal setelah menghadapi situasi sulit seperti perceraian.

Namun kenyataannya, kondisi ideal tersebut sering kali sulit tercapai. Dalam budaya Madura, perceraian dipandang sebagai kegagalan laki-laki dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga sehingga mereka kerap merasa malu, terhina, dan menjadi bahan gunjingan (Ariyani, 2018). Keadaan ini mencerminkan adanya perlakuan negatif dan diskriminasi secara langsung berupa pembatasan akses terhadap ruang sosial serta pelemahan status sosial, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan psikologis individu (Mayor & O'Brien, 2005). Tekanan sosial semacam ini berdampak pada terganggunya berbagai dimensi kesejahteraan psikologis sebagaimana dikemukakan Ryff (1989), di mana laki-laki pasca perceraian cenderung mengalami hambatan dalam penerimaan diri, menjalin dan mempertahankan hubungan sosial, melemahnya otonomi dan penguasaan lingkungan, ketidakjelasan arah maupun tujuan hidup, serta terhambatnya proses pertumbuhan pribadi.

Disisi lain, penelitian Ryff (1995) menunjukkan bahwa perempuan justru cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena perbedaan dalam pola pikir, strategi koping, serta kecenderungan untuk lebih aktif dalam relasi sosial. Perempuan lebih terbuka

dalam mengekspresikan emosi, seperti dengan bercerita kepada orang lain, dan lebih senang menjalani relasi sosial dibanding laki-laki. Sehingga perempuan memiliki skor lebih tinggi pada dimensi hubungan positif dan pertumbuhan pribadi. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian Leopold (2018) menunjukkan bahwa perceraian berdampak pada penurunan kesejahteraan psikologis bagi kedua gender, namun laki-laki cenderung mengalami kerentanan yang lebih besar dibanding perempuan. Kerentanan ini terutama dipicu oleh terbatasnya akses terhadap anak, hilangnya peran sebagai pengasuh utama, serta minimnya dukungan sosial pasca perceraian. Sementara itu, perempuan relatif lebih mampu mempertahankan stabilitas psikologis berkat jaringan sosial yang lebih kuat dan keterlibatan yang berkelanjutan dalam relasi keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana nilai-nilai budaya Madura memberikan tekanan sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis laki-laki yang mengalami perceraian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian ini melalui teori kesejahteraan psikologis yang dipelopori oleh Ryff.

Kesejahteraan psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membentuk pengalaman hidup seseorang. Huppert (2009) menyebutkan bahwa dukungan sosial, terutama dari keluarga berperan penting dalam membangun relasi positif dan penerimaan diri. Kepribadian yang terbuka dan energik juga memperkuat kesejahteraan emosional. Selain itu usia dan jenis kelamin turut memengaruhi fungsi sosial dan kemampuan adaptasi. Dolan, et al (2008) menambahkan bahwa kondisi ekonomi yang baik mendukung penguasaan lingkungan dan mengurangi stress.

Ryff dan Singer (2008) menegaskan bahwa kesejahteraan psikologis sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Pada budaya barat umumnya menekankan pada nilai kemandirian, sedangkan budaya timur menekankan nilai kekeluargaan dan hubungan positif dengan orang lain. Sebagaimana dalam budaya Madura yang sangat menjunjung tinggi nilai kolektivitas dan kehormatan keluarga, perceraian laki-laki dipandang bukan sekadar kegagalan rumah tangga, melainkan juga kegagalan menjaga harga diri

dan memenuhi standar maskulinitas. Tekanan sosial berupa cap negatif seperti *so'leran* atau *tak lakek*, pengawasan ketat, serta penilaian moral yang merendahkan berpotensi melemahkan posisi sosial dan menimbulkan perasaan terasing dalam lingkungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsekuensi perceraian tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga muncul dari lingkungan sosial sangat mempengaruhi sejauh mana seseorang mampu bertahan dan bangkit setelah perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, stigma sosial menjadi bagian dari lingkungan yang memengaruhi ruang hidup seseorang. Hal ini sejalan dengan *teori medan* yang dikemukakan oleh Kurt Lewin yang dirumuskan dalam formula $R_h = (P + E)$, yakni ruang hidup merupakan gabungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis. Ruang hidup yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami individu pada suatu waktu, termasuk persepsi tentang diri, lingkungan sosial dan fisik, harapan, tujuan, kenangan masa lalu, serta gambaran tentang masa depan (Alwisol, 2019). Dengan kata lain, perilaku seseorang terbentuk melalui interaksi antara dirinya dan lingkungannya.

Sebagaimana Goffman (1963) mengemukakan istilah stigma sosial merujuk pada keadaan suatu kelompok sosial yang membuat identitas terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan sifat fisik, perilaku, ataupun sosial yang dipersepsikan menyimpang dari norma-norma dalam komunitas tersebut. Menurut (Phelan, 2001) stigma muncul ketika beberapa komponen saling terkait. Pertama, individu membedakan dan memberi label pada perbedaan manusia. Kedua, kepercayaan budaya yang dominan mengaitkan orang yang diberi label dengan karakteristik yang tidak dapat diterima, yaitu stereotip negatif. Ketiga, individu yang dilabeli ditempatkan dalam kategori yang berbeda, menciptakan pemisahan antara "kita" dan "mereka." Keempat, orang yang diberi label mengalami kehilangan status dan diskriminasi, yang mengarah pada hasil yang tidak setara. Dengan demikian, istilah stigma digunakan ketika elemen-elemen pelabelan, stereotip, pemisahan, kehilangan status, dan diskriminasi terjadi bersamaan dalam konteks kekuasaan yang memungkinkan komponen-komponen stigma terungkap.

Menurut Major dan O'Brien (2005) bentuk stigma di masyarakat bisa berbeda-beda tergantung pada norma budaya yang berlaku. Sejalan dengan itu, perspektif lintas budaya dalam psikologi menekankan cara seseorang merasakan, berpikir, dan menghadapi pengalaman hidup selalu dipengaruhi oleh norma, nilai, dan praktik budaya di sekitarnya (Levy & Shiraev, 2012). Artinya, peristiwa yang sama seperti perceraian dapat dimaknai secara berbeda oleh tiap komunitas, sehingga menghasilkan dampak psikologis yang beragam. Dalam masyarakat Madura, perceraian memiliki dimensi yang lebih kompleks karena sangat terkait dengan konstruksi budaya yang menjunjung tinggi harga diri (*harga diri/martabat*) dan kehormatan keluarga khususnya bagi laki-laki. Hadi, Saiful, dan Mashur (2023) menegaskan bahwa masyarakat Madura hidup dalam pusaran stigma yang dilekatkan pada perilaku individu yang dianggap menyimpang dari norma, termasuk kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga.

Stigma sosial budaya madura dapat dipahami melalui kerangka yang dijelaskan oleh Link dan Phelan (2001) di mana stigma terbentuk melalui beberapa komponen yang saling berkaitan. Pertama, pemberian label, misalnya laki-laki bercerai diberi sebutan seperti *so'leran* atau *tak lakek* yang mencerminkan ketidakmampuan menjalankan peran maskulin dan menjaga kehormatan keluarga. Kedua, muncul stereotip negatif yang melekat secara keyakinan budaya, di mana laki-laki bercerai dianggap lemah, gagal, tidak bertanggung jawab, atau tidak mampu menjadi kepala keluarga. Individu yang menyadari dirinya menerima stereotip negatif cenderung menjauh dari lingkungan sosial dan merasa terisolasi karena meyakini bahwa orang yang telah dilabeli berbeda dengan mereka yang tidak menyandang label tersebut (Phelan, 2001). Selanjutnya, ketiga terjadi pemisahan sosial di mana laki-laki bercerai ditempatkan dalam kategori berbeda dengan laki-laki yang masih menikah. Proses ini pada akhirnya berujung pada diskriminasi yang tampak dalam bentuk perlakuan berbeda dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dijadikan bahan gunjingan, penghindaran oleh masyarakat yang mengarah pada penurunan sosial, atau kehilangan posisi sosial. Diskriminasi yaitu perilaku yang merugikan individu karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu (Taylor, Peplau, &

Sears, 2009). Dengan demikian, seseorang terstigmatisasi ketika fakta bahwa mereka diberi label, dikucilkan, dan dikaitkan dengan karakteristik yang tidak diinginkan membuat mereka kehilangan status dan diskriminasi (Phelan, 2001).

Mayor dan O'Brien (2005) menyatakan bahwa stigma dapat menjadi ancaman bagi identitas individu, yang pada akhirnya menimbulkan stres dan memengaruhi cara individu mengevaluasi dirinya sendiri. Dalam konteks masyarakat Madura, dampak stigma ini menjadi semakin intens karena diperkuat oleh sistem nilai budaya yang menjunjung tinggi harga diri, kehormatan keluarga, serta peran maskulinitas yang tegas dan dominan. Nilai-nilai tersebut menempatkan laki-laki Madura dalam posisi sosial yang tinggi akan ekspektasi, sehingga mereka menghadapi tekanan besar untuk terus mempertahankan citra diri positif di hadapan masyarakat (Rifai *et al.*, 2022).

Berdasarkan fenomena diatas, beberapa penelitian telah mengkaji dampak perceraian terhadap kondisi psikologis laki-laki. Namun belum ada penelitian yang mengaitkan nya dengan stigma sosial budaya Madura. Stigma sosial budaya Madura dipilih sebagai variabel prediktor karena dalam budaya Madura, kehormatan dan harga diri laki-laki merupakan aspek penting yang dijaga secara kolektif. Perceraian tidak hanya membawa konsekuensi hukum, tetapi juga tekanan sosial yang dapat berdampak pada penurunan rasa percaya diri, terganggunya relasi sosial, dan menurunnya kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh stigma sosial budaya Madura terhadap kesejahteraan psikologis laki-laki etnis Madura yang bercerai, serta menjelaskan bagaimana tekanan sosial memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Stigma Sosial Budaya Madura terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Laki-laki Etnis Madura yang Bercerai.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membatasi fokus penelitian ini pada pengaruh stigma sosial budaya Madura terhadap kesejahteraan psikologis pada laki-laki etnis Madura yang bercerai. Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah apakah stigma sosial budaya Madura berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis pada laki-laki etnis Madura yang bercerai?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh antara stigma sosial budaya Madura dengan kesejahteraan psikologis pada laki-laki etnis Madura yang bercerai?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian teori, terutama pada bidang psikologi terkait pengaruh stigma sosial budaya Madura terhadap kesejahteraan psikologis pada laki-laki yang bercerai. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan teoritis untuk penelitian lebih lanjut mengenai stigma sosial, terutama pada konteks laki-laki etnis Madura yang bercerai.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Subjek Penelitian

Melalui penelitian ini, laki-laki etnis Madura yang bercerai dapat mengetahui stigma sosial budaya Madura yang mereka hadapi dan memperoleh informasi terkait kesejahteraan psikologis mereka. Dengan begitu, mereka dapat lebih memahami situasi yang dialami.

b. Bagi Keluarga Subjek

Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap keluarga subjek mengenai pengaruh stigma sosial budaya Madura terhadap kesejahteraan psikologis pada laki-laki etnis Madura yang bercerai.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara stigma sosial budaya Madura dan kesejahteraan psikologis, khususnya pada kelompok laki-laki etnis Madura yang bercerai. Selain itu, penelitian ini dapat membuka peluang eksplorasi lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas atau dengan subjek dan konteks budaya yang berbeda.